

KEBIJAKAN EKONOMI VOC DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT INDONESIA

Rosmaida Sinaga¹, Silfira Elisy Putri², Yohana Magdalena Siagian³, Nadia
Silvia⁴, Muhammad Fahrul Zikri⁵

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Rosmaidasinaga@unimed.ac.id¹, silfiraelisaputri0551@gmail.com²,
ysiagian109@gmail.com³, vivonadia004@gmail.com⁴, zikrilapem3s@gmail.com⁵

ABSTRACT

This research discusses the economic policies of the Dutch East India Company (VOC) in the Indonesian archipelago from the 17th to the 18th century, along with their impact on the socio-economic structure of society. Using historical research methods and a literature review approach, this study examines VOC archives, local treaty documents, and recent scholarly literature. The research findings indicate that the VOC's economic policies were oriented towards a monopoly on the spice trade, political-economic contracts with local rulers, production control through a forced labor system, and the use of military force. These policies shifted the economic orientation of society from domestic needs-based to integrated into global trade. The impact was the emergence of socio-economic inequality, the loss of local sovereignty, and increased exploitation of the people, which later led to the forced cultivation system (Cultuurstelsel) during the Dutch East Indies government. This research also confirms the existence of community resistance, both in the form of war, smuggling, and social movements, in response to oppressive colonial policies.

Keywords: VOC, monopoly, economic policy, colonialism, Nusantara

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kebijakan ekonomi Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Nusantara pada abad ke 17 hingga 18 beserta dampaknya terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat. Dengan menggunakan metode sejarah (historical research) dan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menelaah arsip VOC, dokumen perjanjian local, serta literature ilmiah mutakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi VOC berorientasi pada monopoli perdagangan rempah, kontrak politik-ekonomi dengan penguasa local, pengendalian produksi melalui sistem kerja paksa, serta penggunaan kekuatan militer. Kebijakan ini mengubah orientasi ekonomi masyarakat dari berbasis kebutuhan domestic menjadi terintegrasi dalam perdagangan global. Dampaknya adalah munculnya ketimpangan sosial-ekonomi, hilangnya kedaulatan local, serta meningkatnya

eksploitasi rekyat yang kemudian berlanjut pada sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) di era pemerintahan Hindia Belanda. Penelitian ini juga menegaskan adanya perlawanan masyarakat baik dalam bentuk perang, penyeludupan, maupun gerakan sosial sebagai respon terhadap kebijakan colonial yang menindas.

Kata Kunci: VOC, monopoli, kebijakan ekonomi, kolonialisme, Nusantara

A. Pendahuluan

Kehadiran Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Abad ke-17 memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi di wilayah Nusantara. Sebagai sebuah perusahaan dagang yang mendapatkan hak istimewa melalui oktroi, VOC tidak hanya berfungsi sebagai badan bisnis, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki kekuasaan politik dan militer yang cukup besar. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh VOC berfokus pada penguasaan perdagangan, pengaturan produksi, dan pembatasan akses pasar melalui kerja sama dengan penguasa setempat serta tindakan tegas. Pelaksanaan sistem monopoli ini telah mengubah secara drastis pola perdagangan tradisional Nusantara yang sebelumnya terbuka dan bervariasi, menjadi sistem yang terfokus pada keuntungan perusahaan kolonial. Dengan begitu, orientasi ekonomi masyarakat lokal tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan internal komunitas, tetapi lebih untuk memenuhi permintaan dan keuntungan dari VOC.

Dampak dari kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh VOC tidak hanya terlihat di sektor

perdagangan, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Monopoli serta kontrol atas sumber daya telah mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi hasil ekonomi, menurunkannya kedaulatan komunitas lokal atas produksi rempah-rempah, serta akses mereka terhadap jaringan perdagangan internasional yang berkurang. Selain itu, perubahan dalam fokus produksi menyebabkan pergeseran dalam cara masyarakat mencari nafkah dan melemahkan daya tawar mereka terhadap pihak luar. Dalam jangka panjang, hal ini menghasilkan warisan ketergantungan ekonomi dan perubahan dalam interaksi sosial yang meninggalkan dampak hingga periode kolonial selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi VOC tidak hanya memengaruhi aspek material, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan sosial dan budaya masyarakat di Nusantara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (historical research) dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) sebagaimana dikemukakan (Ismaun, 2005; Zed 2014). Data penelitian bersumber dari arsip VOC, dokumen

perjanjian local, serta literature ilmiah jurnal sejarah mutakhir (Dhohirrobbi, 2024; Purba et al., 2024). Prosedur penelitian meliputi tahap heuristic, yaitu penelusuran dan pengumpulan sumber primer maupun sekunder, dilanjutkan dengan kritik sumber untuk menilai keaslian dan kredibilitas data, interpretasi guna memahami konteks sosial ekonomi, serta historiografi untuk menyusun hasil penelitian secara sistematis dan kronologis (Kurniawan, 2014). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif induktif. Deduktif dipakai untuk menurunkan pemahaman dari kerangka teori umum ke kasus spesifik kebijakan VOC, sedangkan induktif digunakan untuk menafsirkan fakta empiris sehingga menghasilkan generalisasi yang lebih luas (Habibatullah et al., 2021). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan gambaran factual mengenai praktik monopoli, tanam paksa, serta bentuk perlawanan masyarakat terhadap kebijakan colonial.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kebijakan ekonomi voc di wilayah Indonesia

Kebijakan ekonomi yang dirancang dan diterapkan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di wilayah Indonesia sepenuhnya berorientasi pada monopoli perdagangan rempah dan komoditas ekspor. Fakta historis menunjukkan bahwa sejak diberi hak oktroi pada tahun 1602 oleh

pemerintah Belanda, VOC memiliki kewenangan untuk berdagang, berperang, membuat perjanjian, serta membangun benteng di Asia. Hak inilah yang menjadi dasar hukum monopoli VOC di Nusantara (Dhohirrobbi, 2024). Dalam perancangannya, VOC menetapkan strategi monopoli pembelian dan penjualan. Komoditas seperti cengkeh, pala, dan fuli di Maluku hanya boleh dijual kepada VOC. Selain itu, VOC memberlakukan kontrak politik-ekonomi dengan penguasa lokal yang mewajibkan penyerahan hasil bumi dengan harga yang ditentukan VOC. Fakta ini didukung oleh dokumen perjanjian VOC dengan Kesultanan Ternate dan Tidore yang mengatur monopoli rempah sejak abad ke-17 (Purba dkk., 2024).

Implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui kontrol militer dan administratif. VOC menempatkan benteng dan garnisun di pelabuhan strategis seperti Ambon, Batavia, dan Banda, sekaligus memaksa rakyat lokal bekerja untuk kebutuhan logistik dan perkebunan. Untuk menjamin kelancaran produksi, VOC bekerja sama dengan bupati dan elite lokal sebagai perantara. Fakta ini terlihat jelas dalam sistem Priangan, di mana rakyat dipaksa menanam kopi yang hasilnya diserahkan kepada VOC melalui bupati (Kurniawan, 2014).

Lebih jauh, VOC juga merancang pengendalian produksi dengan cara ekstrem: misalnya,

melakukan hongi tochten (ekspedisi perusakan tanaman rempah yang ditanam tanpa izin) di Maluku. Fakta historis ini tercatat dalam arsip Belanda dan penelitian modern, yang menegaskan bahwa VOC sengaja membatasi jumlah pohon cengkeh untuk menjaga harga tetap tinggi di pasar Eropa (Nugraha, 2023).

Kebijakan ekonomi VOC terbukti menjadi cikal bakal sistem eksploitasi kolonial. Setelah VOC bangkrut pada 1799, praktik penyerahan hasil bumi dan orientasi produksi ekspor diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini kemudian berkembang menjadi sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) pada abad ke-19. Fakta ini menunjukkan kesinambungan eksploitasi ekonomi dari VOC menuju pemerintahan kolonial Hindia Belanda (Tasnur dkk., 2022). Dengan demikian, secara faktual dapat ditegaskan bahwa kebijakan ekonomi VOC di Indonesia dirancang untuk memonopoli perdagangan melalui hak oktroi, kontrak monopoli dengan penguasa lokal, serta pengendalian produksi. Penerapannya dilakukan dengan dukungan militer dan kolaborasi elite lokal, bahkan sampai pada perusakan tanaman pesaing. Semua kebijakan ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi masyarakat Nusantara, dari yang sebelumnya berbasis subsisten menjadi terintegrasi dalam jaringan perdagangan global yang dikendalikan Belanda.

Sistem monopoli dan perdagangan VOC

Sistem monopoli VOC sejak abad ke-17 membentuk perubahan struktural dalam perekonomian lokal Nusantara. Hak istimewa dari Staten Generaal menjadikan VOC bukan hanya perusahaan dagang, melainkan juga aktor politik dan militer dengan kewenangan luas. Jalur perdagangan dari Tanjung Harapan hingga Selat Magelhaens dikuasai sepenuhnya sehingga masyarakat produsen rempah di Maluku, Banda, dan Banten terpaksa menjual hasil panennya kepada VOC dengan harga yang ditentukan. Mekanisme ini menghapus kemandirian ekonomi lokal dan menimbulkan ketergantungan struktural. Kebijakan pengendalian produksi VOC memperkuat monopoli yang sudah terbentuk. Tanaman rempah yang melebihi kuota sering dimusnahkan untuk menjaga kestabilan harga di pasar internasional. Larangan perdagangan dengan pedagang non-VOC menutup akses masyarakat lokal terhadap jaringan pasar Asia maupun antarwilayah Nusantara. Dampak kebijakan tersebut ialah melemahnya pasar tradisional yang sebelumnya menjadi tulang punggung perdagangan maritim lokal (Lumban Tungkup dkk., 2023).

Distribusi keuntungan dari perdagangan rempah tidak berlangsung merata. Elit lokal yang menjalin kerja sama dengan VOC memperoleh keuntungan lebih besar, sedangkan petani dan pekerja hanya

menerima upah rendah. Struktur ekonomi yang sengaja dipelihara VOC memastikan adanya kelompok perantara yang loyal sekaligus mempertegas kontrol atas sumber daya. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan sosial-ekonomi yang tajam antara elit lokal dan masyarakat biasa. Orientasi produksi masyarakat lokal juga mengalami perubahan signifikan. Aktivitas produksi yang semula berorientasi pada kebutuhan domestik dan pasar regional beralih menjadi produksi untuk memenuhi permintaan pasar Eropa. Fokus pada rempah-rempah menghilangkan peluang diversifikasi ekonomi. Struktur ekonomi lokal kehilangan ketahanan karena bergantung pada satu jenis komoditas. Penurunan harga atau permintaan global secara langsung memperburuk kondisi masyarakat produsen (Lumban Tungkup dkk., 2023).

Dominasi ekonomi VOC berjalan beriringan dengan intervensi politik terhadap kekuasaan lokal. Penguasa yang patuh kepada VOC didukung, sementara kelompok yang menolak disingkirkan. Praktik ini menimbulkan stratifikasi sosial baru. Kelompok yang dekat dengan VOC memiliki akses pada modal dan keuntungan perdagangan, sedangkan masyarakat kecil semakin terpinggirkan. Hubungan politik dan ekonomi saling menopang sehingga dominasi VOC semakin menguat. Transformasi ekonomi lokal akibat monopoli VOC berlangsung secara mendalam. Sistem perdagangan

terbuka dan dinamis bergeser menjadi struktur tertutup yang terpusat pada kepentingan kolonial. Nusantara dijadikan pemasok komoditas tunggal bagi pasar Eropa dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat lokal. Pola monopoli ini membentuk warisan ekonomi kolonial yang menciptakan ketimpangan sosial sekaligus meneguhkan ketergantungan jangka panjang terhadap kekuatan asing (Lumban Tungkup dkk., 2023).

Dampak kebijakan ekonomi Voc di Indonesia

Sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) yang diterapkan setelah era VOC merupakan kelanjutan dari praktik ekonomi monopoli yang dilakukan oleh VOC. Kebijakan ini memberikan keuntungan besar bagi Belanda, terutama dalam bentuk peningkatan produksi komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Hasil dari sistem tanam paksa ini kemudian dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang tidak adil, sehingga pendapatan mengalir deras ke kas Belanda untuk membayar utang perang dan mendanai pembangunan di Eropa. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi kolonial lebih mengutamakan kepentingan VOC/Belanda ketimbang kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, dari sudut pandang masyarakat Indonesia, kebijakan ini justru mengakibatkan penderitaan yang besar. Petani terpaksa menyerahkan sebagian tanah mereka, bahkan bagi yang tidak

memiliki lahan harus bekerja berhari-hari di perkebunan milik pemerintah. Akibatnya, banyak orang mengalami kelaparan, angka kematian meningkat, dan kesejahteraan sosial semakin menurun. Penyerahan hasil pertanian dengan harga tetap membuat petani tidak mendapatkan keuntungan, justru menjadi korban eksploitasi. Hal ini mendatangkan ketegangan sosial antara rakyat dan pemerintah kolonial, yang kemudian memicu berbagai bentuk perlawanan. Di sisi lain, terdapat juga efek positif dari sistem Tanam Paksa ini, seperti masyarakat mulai mengenal metode bercocok tanam yang baru, adanya kemajuan infrastruktur, serta perputaran uang di komunitas pedesaan. Namun, manfaat tersebut tidak sebanding dengan penderitaan dan penindasan yang dialami oleh rakyat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi VOC melalui sistem tanam paksa dapat dipandang sebagai contoh nyata dari eksploitasi kolonial yang menguntungkan Belanda, namun menghancurkan kesejahteraan masyarakat pribumi.

Sistem Tanam Paksa menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui peningkatan dalam produksi tanaman ekspor dan aliran pendapatan yang menguntungkan pihak kolonial. Namun, dampak sosial yang kompleks termasuk ketegangan antara masyarakat pribumi dan pemerintah kolonial, serta pemberontakan petani akibat penindasan dan eksploitasi juga

terjadi" (Maharani Br Purba dkk. , 2024:565).

perlawanan masyarakat terkait kebijakan ekonomi voc dan respon yang ditunjukkan

Munculnya perlawanan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi VOC tidak lepas dari aturan dagang yang sangat merugikan rakyat. VOC adalah perusahaan dagang, tetapi memiliki hak istimewa seperti negara, misalnya membuat perjanjian, membangun benteng, hingga memelihara tentara (ANRI, 2017). Kebijakan utama yang membuat rakyat menderita adalah monopoli perdagangan rempah. Rakyat hanya boleh menjual hasil panen kepada VOC dengan harga rendah, ditambah adanya aturan penyerahan wajib (*verplichte leverantie*) dan kebijakan ekstirpasi, yaitu pohon rempah ditebang jika dianggap berlebihan (Rijal, 2020). Sistem ini membuat petani kehilangan kebebasan berdagang dan sangat merugi.

Selain menekan rakyat kecil, VOC juga melemahkan kerajaan-kerajaan lokal. Contohnya, Kerajaan Gowa dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya setelah kalah perang, dan Banten juga ditekan ketika Sultan Ageng Tirtayasa menolak monopoli VOC (Akbar, 2019). Dari sini terlihat bahwa kebijakan ekonomi VOC bukan hanya soal keuntungan dagang, tapi juga alat politik untuk menguasai wilayah. Respons masyarakat bermacam-

macam. Ada yang melakukan perlawanan terbuka dengan senjata, seperti rakyat Maluku, Gowa-Makassar, dan Banten. Ada pula yang melawan dengan cara ekonomi, misalnya menjual rempah secara diam-diam kepada pedagang asing atau menanam tanaman lain agar tidak terlalu bergantung pada VOC (Rijal, 2020). Selain itu, banyak rakyat mendukung pemimpin lokal atau tokoh agama yang menolak aturan VOC, sehingga muncul perlawanan sosial dengan semangat kebersamaan dan agama (Akbar, 2019). perlawanan masyarakat terjadi karena kebijakan VOC yang tidak adil. Monopoli dan aturan yang keras membuat rakyat menderita, sehingga mereka melawan dengan berbagai cara, baik lewat perang, penyelundupan, maupun perlawanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sejak lama masyarakat Indonesia selalu berusaha melawan penindasan (ANRI, 2017).

E. Kesimpulan

Kehadiran VOC di Nusantara membawa perubahan fundamental terhadap struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Melalui hak oktroi, VOC tidak hanya berperan sebagai perusahaan dagang, tetapi juga sebagai penguasa politik dan militer. Kebijakan monopoli perdagangan rempah, kerja sama dagang elit lokal, control produksi, hingga menggunakan kekuatan militer menciptakan pola eksploitasi yang menekan petani dan melemahkan kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal.

Dampak dari kebijakan tersebut adalah ketimpangan sosial-ekonomi, hilangnya akses masyarakat terhadap perdagangan bebas, serta ketergantungan pada sistem produksi ekspor untuk kepentingan kolonial. Dalam jangka panjang, praktik ekonomi VOC menjadi cikal bakal lahirnya sistem tanam paksa yang memperparah eksploitasi di era kolonial. Meskipun VOC berhasil mempertahankan monopoli hamper dua abad, perlawanan rakyat di berbagai daerah membuktikan adanya kesadaran kolektif untuk menolak penindasan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi VOC bukan sekedar praktik dagang, melainkan instrument kolonialisme yang meninggalkan warisan ketimpangan dan eksploitasi dalam sejarah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I. (2019). *Kebijakan ekspansi VOC dari perdagangan rempah menjadi alat kekuasaan kolonial di Indonesia*. J-Innovative: Journal of Social Studies Education, 5(2), 57–68. Universitas Pendidikan Indonesia. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu>
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (2017). *Inventaris arsip VOC dan organisasi perdagangannya di Nusantara*. Sejarah Nusantara Collection (Brill–ANRI). Retrieved from

- <https://sejarah-nusantara.anri.go.id>
- Dhohirrobbi, A. (2024). *Sejarah VOC di Indonesia*. Maliki Interdisciplinary Journal, 2(10), 321-329
- Habibatullah, A., Fitria, R., & Sari, D. (2021). *Metode penelitian kualitatif dalam kajian ilmu sosial*. Jurnal Kajian Sosial Humaniora, 5(1), 45–56.
- Ismaun. (2005). *Metode penelitian sejarah*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, H. (2014). *Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870*. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 11(2), 163-72.
- Nugraha, M. S., & Mahzuni, D. (2023). *Kelompok Lingkungan Hindia-Belanda: Pendirian Hingga Dampaknya Terhadap Konservasi Alam di Jawa 1912-1937*. Siginjai: Jurnal Sejarah, 3(1), 1-19.
- Tasnur, I., Apriyanto, J., & Arrazaq, N. R. (2022). *Liberalisme dan Monetisasi Ekonomi di Hindia Belanda (1870-1900)*. Keraton: Journal of History Education and Culture, 4(2), 71-78.
- Purba, M. B., Sari, A., & Ronauli, A. (2024). *Dampak dari Sistem Tanam Paksa Dalam Perekonomian dan Kehidupan Masyarakat Indonesia*. AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation, 1(2), 565-569.
- Rijal, M. (2020). *Hilangnya hak eksklusif tanaman rempah asli: Dampak monopoli VOC terhadap masyarakat Maluku*. Pangadereng: Jurnal Hukum, Sosial, dan Budaya, 6(1), 33–47
- Tungkup, J. A. L., Sianturi, F. R., Santika, L., Damanik, P. S. S., & Sinaga, R. (2024). *Kebijakan ekspansi VOC dari perdagangan rempah hingga kolonialisme*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4(5), 8755–8760. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.